

Dalam Rangka Hari Pangan Sedunia 16 Oktober 2001

## **Seruan Solidaritas Konsumen - Petani**

Untuk Pelestarian Sumber Daya Pangan Nasional dan Ketahanan Pangan Nasional

Salah satu tuntutan rakyat pada 1966 adalah penurunan harga. Tuntutan ini muncul karena harga pangan begitu tinggi dan tidak terjangkau daya beli sebagian besar rakyat Indonesia. Saat itu tingkat inflasi mencapai 300% sehingga uang yang dimiliki rakyat merosot drastis nilainya. Kondisi ini berujung pada jatuhnya pemerintahan Presiden Soekarno.

Tuntutan serupa muncul lagi pada awal 1998 dimana nilai rupiah jatuh terhadap dollar Amerika Serikat dari sekitar Rp 2.500 hingga mencapai lebih dari Rp 14.000 per US\$1. Lebaranya kesenjangan antara segelintir penduduk Indonesia terkaya dengan sebagian besar penduduk yang miskin menjadikan daya beli sebagian besar penduduk amat rentan terhadap gejolak harga. Situasi pada 1998 ini akhirnya mendorong Presiden Soeharto untuk menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Konsumen di Indonesia yang selama ini selalu mendapat kenyamanan berupa harga pangan yang murah (khususnya beras) seakan tak rela bila harga pangan naik dan kenyamanan berkurang. Padahal, secara tak disadari, kenyamanan itu terbukti berdampak buruk pada sejumlah besar saudara setanah air yang merupakan masyarakat tani penghasil kebutuhan pangan bagi warga negara Indonesia. Kenyamanan yang dinikmati konsumen selama ini hanya mungkin terjadi diatas pengorbanan masyarakat tani yang hanya mendapat imbalan kecil atas jerih payah memproduksi pangan untuk bangsanya.

Sementara itu, penerapan kebijakan nasional berupa penurunan bea masuk atas beras dan bahan pangan pokok lain telah memberikan kontribusi penting terhadap makin buruknya kondisi sumber daya pangan domestik. Beras dan bahan pangan pokok lain dipaksa bersaing dengan bahan impor. Pemerintah tidak mampu secara sistematis dan terarah menggunakan instrumen bea masuk sebagai pelindung bagi bahan pangan lokal sebagaimana yang dilakukan banyak negara lain. Pemerintah lebih memilih tunduk secara berlebihan terhadap tekanan internasional yang secara nyata tidak berpihak pada warga negara Indonesia.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah selama ini terbukti tidak mengarah pada peningkatan pendapatan secara merata atau distribusi kekayaan yang memungkinkan daya beli konsumen terhadap pangan makin meningkat. Peningkatan daya beli ini amatlah penting agar harga jual pangan di tingkat petani juga makin meningkat.

Karenanya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengarahkan tuntutan bukan hanya pada harga pangan semurah-murahnya. Tuntutan harus diarahkan pada peningkatan pendapatan penduduk secara merata, baik konsumen maupun petani. Dengan pemerataan pendapatan ini, daya beli konsumen dapat meningkat sehingga harga pangan di tingkat petani juga meningkat. Konsumen sangat diharapkan bersikap bijak untuk mengutamakan konsumsi yang bersumber dari bahan pangan pokok dari dalam negeri atau lokal. Selain itu, secara bertahap konsumen diharapkan bersedia membayar harga bahan pangan pokok lokal itu dengan harga yang lebih tinggi sehingga mencapai harga yang adil bagi masyarakat tani dan petani.

Orientasi konsumsi hanya pada bahan pangan dengan harga semurah-murahnya tanpa memperhatikan apakah berasal dari dalam negeri atau impor memang akan menguntungkan konsumen dalam jangka pendek. Kondisi ini secara bertahap akan membuat bahan pangan pokok lokal tak lagi dapat bersaing sehingga minat masyarakat tani dan petani untuk berproduksi secara optimal makin berkurang. Dalam jangka panjang, mata pencaharian dan profesi sebagai petani di Indonesia akan menjadi tidak lagi menarik. Konsekuensinya, konsumen di Indonesia akan semakin tergantung dengan bahan pangan impor dalam jumlah yang semakin besar. Hal ini tentunya akan mengancam produksi pangan secara berkelanjutan di dalam negeri yang secara nyata akan berdampak pada konsumsi pangan secara berkelanjutan.

Penciptaan kondisi yang kondusif terhadap produksi dan konsumsi berkelanjutan yang demikian amatlah disadari tidak mudah dan membutuhkan waktu, namun diharapkan dapat makin meningkatkan pendapatan masyarakat tani dan petani sehingga dapat hidup layak dan sejahtera. Kehidupan masyarakat tani dan petani yang sejahtera amatlah berkaitan dengan produksi pangan secara berkelanjutan. Produksi pangan berkelanjutan adalah basis kuat bagi terjaminnya

konsumsi pangan berkelanjutan. Basis ini hanya dapat berlangsung dengan baik apabila masyarakat tani dan petani terjamin untuk hidup layak dan sejahtera. Basis ini juga amat terkait dengan pelestarian sumber daya pangan nasional demi ketahanan pangan nasional. Karenanya, konsumen yang bijak adalah konsumen yang berorientasi pada konsumsi berkelanjutan, bukan yang berorientasi pada harga pangan semurah-murahnya di atas pengorbanan masyarakat tani dan petani. Dalam situasi sekarang ini, konsumsi pangan berkelanjutan berbasis produksi pangan berkelanjutan hanya dapat tercipta apabila gerakan konsumen berlangsung atas peran serta dan gotong royong antara konsumen dengan masyarakat tani dan petani.

### **Apa Yang Harus Dilakukan Konsumen?**

Untuk mendukung gerakan konsumen yang berorientasi pada produksi dan konsumsi pangan berkelanjutan, khususnya terkait dengan pangan, beberapa hal yang dapat dilakukan:

1. Mengutamakan pembelian beras dan bahan pangan pokok lain dari dalam negeri atau lokal dengan memperhatikan kualitasnya sesuai daya beli masing-masing yang tidak merugikan kepentingan masyarakat tani dan petani. Pembelian beras dan bahan pangan pokok dari dalam negeri merupakan bukti sikap gotong royong antara konsumen pangan dengan masyarakat tani dan petani yang menentukan hidup matinya masyarakat tani dan petani dalam negeri di masa yang akan datang. Masyarakat tani dan petani yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia adalah saudara sebangsa dan setanah air yang memiliki hak untuk hidup layak dan sejahtera sebagaimana warga negara Indonesia lainnya.
2. Mendorong para pedagang beras dan bahan pangan pokok lain untuk mengutamakan jual beli beras dan bahan pangan pokok lain dari dalam negeri atau lokal. Permintaan konsumen akan mendorong para pedagang untuk mengarahkan distribusi beras dan bahan pangan pokok lain dari dalam negeri tanpa mengabaikan kualitas dan harga yang terjangkau daya beli konsumen.
3. Mendesak pemerintah untuk kembali menerapkan kebijakan nasional yang mengenakan bea masuk setinggi-tingginya atas impor beras dan bahan pangan pokok lain dimana bahan serupa juga diproduksi oleh masyarakat tani dan petani dalam negeri atau lokal. Penerapan kebijakan nasional yang mengenakan bea masuk tinggi atas beras dan bahan pangan pokok lain adalah bukti bahwa pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri memang berpihak pada penyelamatan sumber daya pangan domestik untuk penyediaan pangan berkelanjutan bagi warga negara Indonesia.
4. Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan pangan nasional yang berorientasi pada pelestarian sumber daya pangan nasional. Posisi Indonesia sebagai net-importer pangan adalah sesuatu yang memalukan dan harus dijadikan momentum untuk meninjau kembali kebijakan pangan nasional yang selama ini telah berjalan. Ketergantungan Indonesia terhadap bahan pangan impor yang begitu besar, bahkan semakin besar, akan mengancam kemandirian kita sebagai bangsa yang dikenal memiliki budaya agraris.
5. Mendesak pemerintah untuk segera menjalankan kebijakan nasional untuk meningkatkan pendapatan penduduk paling miskin sehingga dapat membayar pangan yang mereka konsumsi dengan harga yang adil (fair trade), bukan dengan harga murah. Janji Presiden Megawati Soekarnoputri untuk memerangi kemiskinan - bukan memerangi orang miskin -- harus dapat dibuktikan dengan langkah-langkah konkrit untuk tetap mengarahkan kebijakan nasional yang berpihak kepada bagian terbesar warga negara Indonesia yang kini masuk dalam kategori orang miskin.
6. Mendorong konsumen kaya berdaya beli kuat untuk membentuk wadah yang memungkinkan terjadinya iklim gotong royong dengan masyarakat tani pemilik lahan kecil atau kurang dari 1 hektar dan petani penggarap sehingga harga jual pangan di tingkat petani makin meningkat. Wadah ini hendaknya dapat memungkinkan penyediaan subsidi untuk petani dari konsumen kaya berdaya beli kuat.

Dengan demikian, gerakan konsumen tentu tidak menghendaki pasar bebas (free trade) yang berakibat pada terpenuhinya hak konsumen atas pangan dengan harga murah yang mengorbankan kepentingan masyarakat tani dan petani. Kondisi ini jelas akan mengancam kelestarian sumber daya pangan nasional. Dalam jangka panjang, konsumen adalah pihak yang paling dirugikan bila tugas penyediaan pangan diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar

bebas dimana harga pangan tidak lagi dapat disesuaikan dengan daya beli konsumen tetapi dikontrol oleh pelaku pasar yang kuat.

Konsumen yang bijak adalah konsumen yang mendukung gerakan konsumen demi terpenuhinya hak konsumen atas pangan dengan harga yang adil yang mendorong masyarakat tani dan petani terus memproduksi pangan secara berkelanjutan untuk konsumsi berkelanjutan demi ketahanan pangan nasional dan kemajuan bangsanya.

Jakarta, 12 Oktober 2001

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

### **Indah Suksmaningsih**

*Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)*

Saya akan mencoba menceritakan pengalaman Lembaga Konsumen, benar nggak sebetulnya ini kata-kata bisa mengontrol kebijakan publik jauhlah dari kenyataan dan sedikit, karena ternyata tidak terlalu gampang, dan apa yang disampaikan oleh ibu Sidney saya kira betul, harusnya barangkali dalam mengontrol soal kebijakan akan lebih terasa oleh Lembaga Konsumen kalau strategi itu ada di depan, jadi memang ketika mau melakukan itu harus punya strategi dulu. Jeleknya apa yang dilakukan YLKI itu bukan suatu strategi didepan, tapi lebih pada memakai feeling saja. Tapi ketika teori itu saya dapatkan, saya juga mendengar bahwa harus cari siapa lawan, siapa kawan, dan strateginya harus jelas, kalau bicara mulai kelihatan, bahwa masa lalu bagaimanapun pendahulu-pendahulu saya, saya menggambarkan persis dengan teori. Maka saya mengatakan kepada teman-teman yang akan melakukan suatu kontrol kebijakan publik, teori itu benar kalau dilakukan dengan baik, barangkali hasilnya lebih terasa kalau dilakukan.

Jadi setelah sekian tahun era pendahulu saya, kemudian saya menganalisa dari dokumen-dokumen yang ada, betul tanpa disadari mereka membuat satu atau tiga kelompok yang luar biasa sehingga sekarang kops surat yang diwariskan kepada saya sudah laku bicara dengan direktur, yang saya kira kesulitan pada jamannya Surotin dan Permadi. Jadi warisan yang diberikan sekarang ini selebar kops surat ini, yang kemudian mampu untuk bisa bicara.

Kalau tadi dikatakan apakah turun dijalan bisa menurunkan korupsi saya kira nggak, tapi yang jadi masalah adalah dibuka pintu saja waktu itu nggak, tapi saya bawa konsumen ngomong ini-loh pengaduan masyarakat—tinggal saja ke satpam jawabnya begitu. Kalau sudah pakai demo dan lain-lain mulailah, yang namanya mereka mulai membuka, oke mari kita bicara, dan pada saat itu keinginan YLKI menjadi refresentasi didalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada masyarakat, itu suatu cita-cita.

Nah setelah cita-cita itu ada dan saya raih, ternyata tidak enak duduk didalam refresentasi itu, dan itu juga suatu bumerang bahwa kemudian saya dimusuhi oleh masyarakat, dikarenakan jumlah refresentasi yang tidak imbang, dan kadang-kadang hanya dipakai untuk legitimasi, dan kadang-kadang tidak ketemu atau kadang-kadang SK dikirim—anda ikut Tim penentuan tarif bus kota, nggak pernah diajak bicara dulu, bagaimana saya bisa duduk disitu, dan SK bisa disebar-sebarkan, artinya bisa diberikan kepada wartawan, dan YLKI juga duduk disitu walaupun nggak pernah diajak bicara, terkadang saya nggak datang untuk menentukan keputusan-keputusan itu karena publiknya jauh lebih marah sama Lembaga Konsumen, kalau kemudian persetujuan itu dimiliki.

Jadi bagaimana gambaran pengalaman Lembaga Konsumen mempelajari masa lalu, saya melihat ada tiga kelompok yang kita sebut sebagai *angry-women* atau *angry-man*, orang yang selalu mengatakan salah semua policy kebijakan pemerintah itu, selalu dia akan mengatakan bahwa kurang ini, kurang itu, pokoknya jelek dulu, tetapi ada satu kelompok yang kita sebut sebagai *keepsmillling* (Mbak Tini), yang selalu membuat hubungan baik dengan pemerintah, walaupun *angry-women* ngomongnya kebablasan, maka dia akan mengatakan itu pendapat dia pribadi, tetapi sebetulnya LSM atau organisasinya tidak begitu. Selalu membuat ini tidak terjadi, karena dalam kondisi yang sangat represif, saya sering menyaksikan Permadi diambil oleh kepolisian hanya perkara dia mengkritik Bogasari. Kemudian yang ketiga, yang disebut orang yang tidak puas bekerja di pemerintahan, orang yang kemudian dari universitas yang datang kemudian memberi tahu, *angry-women* kamu boleh ngomong begini—loh, iniloh

sebetulnya datanya, supaya kata-kata dari angry-women itu diambil karena masuk akal, digunakan—oh betul. Nah kelompok ini ternyata bekerja sama walaupun itu dengan strategi tidak harus ketemu, tapi kalau ada satu masalah tertentu, kelompok-kelompok yang tidak suka karena tidak semua pegawai pemerintah itu tidak jelek artinya ada yang baik, kemudian dia akan datang ke lembaga konsumen, ini loh cara bicaranya begini, persoalan yang jelas begini, sehingga ketiga angry-women atau angry-man nembakkan itu persis tahu. Dan saya kira kasus yang nyata adalah pak Jiteng membuka dengan jelas soal apa yang terjadi dalam listrik swasta, sebetulnya dia datang dulu empat mata dengan Djumrotin, dia mengatakan bahwa anda bicara begini-begini. Lalu Djumrotin mengatakan sebaik apapun anda bekerja, percayalah bahwa anda tidak akan jadi direktur lagi, mengapa nggak innersikel itu yang ngomong sendiri, jadi kemudian orang pada kaget, dan kalau yang ngomong saya itu akan dianggap tukang ngomong (cerewet). Jadi mengapa kita membujuk mati-matian supaya direktur PLN bicara, dan betul dia turun tahta. Tapi ini paling tidak mulai membuka mata orang, bahwa korupsi didalam itu benar-benar ada dan terjadi, itu yang dilakukan.

Ketiga komponen itu sebetulnya bicara soal data yang disampaikan, didalam bahasa teori barangkali data yang digunakan itu harus luar biasa, dan itu barangkali tidak bisa dilakukan oleh lembaga konsumen sendirian, hidupnya juga tidak terlalu kaya, artinya saya nggak punya riset institut yang kemudian bisa mengatakan dan membayar para ekonom, dan tidak semudah itu untuk menggunakan dia sebagai peluru untuk digunakan oleh organisasi seperti lembaga konsumen, dia akan menyukai cara-cara lobi, nah itu harus dibuat satu kerjasama. Dan seandainya model *angry-women*, *keep-smiling* dan *fress-charging*, itu bekerja ditambah lagi sekarang (sudah maju) pakai *net-working*, itu akan mempercepat proses-proses kontrol terhadap penyelenggara negara oleh masyarakat itu sendiri. Nah sesudah generasi itu lewat, apa yang dilakukan lembaga konsumen saat ini adalah bagaimana membuat suatu bulan pengaduan yang bersama-sama, jadi dalam tiga bulan kita umumkan bahwa hari ini di lembaga konsumen topiknya bicara soal PLN, siapapun anda, kemanapun disampaikan, kalau anda punya masalah tentang PLN silahkan datang ke lembaga konsumen, kemudian sesudah didata kita panggil, ada wartawan, ada YLKI, ada penyedia jasa, duduk di depan dan kita sebagai fasilitator, nah disana mereka begitu langsung direktur bisa mengatakan oh persoalan itu sih saya kira 7 hari selesai. Nah kenapa kalau lewat customer servis bisa sebulan bahkan tidak didengarkan sama sekali. Jadi cara-cara itu yang sekarang lebih ampuh, sampai saya agak ketakutan sekarang kalau itu terjadi di daerah.

Di Maumere yang terakhir, apa yang terjadi ketika lembaga konsumen mencoba untuk melakukan dialog, yang dipertemukan antara penyelenggara negara dan masyarakat konsumen, masyarakat yang datang sampai 2 truk, saya yang menjadi perantara masih ketakutan belum berani, mungkin kalau Djumrotin sudah pada tingkatan berani mengatur marahnya rakyat, dan negara harus menjaga PLN-nya supaya dia nggak dihancurin sekalian, malah nggak membangun dua-duanya, PLN nggak membangun dan masyarakatnya marah. Jadi fasilitator itu juga harus dewasa, artinya saya ternyata belum mampu untuk menangkap begitu kejadian, walaupun didalam strateginya sudah diagendakan. Saya kira ini ada cara-cara yang bagus bagaimana membuat kelompok-kelompok masyarakat berani bertemu dengan penyedia jasa yang selamanya tidak ketemu, tapi kalau kemudian ada unsur Jakarta-nya, kemudian difasilitasi, mereka mau ketemu, tetapi tanpa mempelajari bahwa kondisi NTT begitu, suka main tabrak saja, itu juga mengagetkan begitu. Artinya saya akan kembali lagi bahwa strategi itu memang penting, dan kemudian ditambah untuk mengenal lokasi-lokasi. Di Jakarta nggak sebegitu akan terjadi, dan pemerintahnya sudah agak berani menghadapi cacik maki atau komplek-komplek yang dilakukan oleh masyarakat.

Keinginan saya membuat suatu bentuk..., okelah di daerah-daerah mulai ada karena sudah ada kecenderungan, ada asosiasi para bupati, yang kemudian kalau bapak ini menerima komplek dari masyarakat seringkali dia tidak mendengar, dan ketika masyarakat mengurus ke pusat, maka pusat mengatakan itu adalah urusan daerah. Artinya tidak ada lagi satu mekanisme untuk mengontrol tingkah laku para bupati. Yang luar biasa lagi seperti di Maumere misalnya, untuk beli telur saja di-pajak-in sekarang tambah 50 rupiah, ini bagaimana masyarakat yang tidak mampu untuk mampu beli telur, justeru telornya yang di-pajak-in untuk katakanlah ada rabies apapun alasannya.

Nah, bagaimana kemudian kita duduk diantara organisasi konsumen, kemudian organisasi konsumen tidak didirikan di mana-mana. Maksud saya kalau ini bisa berdiri di mana-mana, maka ada satu kebijakan bupati (x) organisasi konsumen yang lain kirimin surat saja, bagaimana memperlakukan bupati itu terhadap rakyatnya yang tidak dilakukan oleh bupati yang lain. Satu NGOs ini (LSM) di Sumba kirimin surat saja pada bupati itu, setiap hari dikirim surat oleh NGO yang lain, tontonkan bahwa kebijakan dia itu memalukan. Jadi barangkali upaya-upaya untuk ikut mengontrol adalah cara-cara memperlakukan mereka itu, inilah bupati yang nggak *care*, nggak ada cara lain, sekarang mau berontak ya ditangkap, atau kemudian dia akan lebih menyiapkan polisi yang lebih gila lagi dari yang dulu-dulu.

Jadi bagaimana tetap mencari satu strategi-strategi yang bisa dilakukan, dan tadi pak Mulya juga mengatakan bahwa solidaritas itu yang paling utama, apa yang membuat tidak terjadinya satu keinginan pada masyarakat itu, karena solidaritas masyarakat yang nggak ada. Orang kaya nggak peduli dia terhadap orang yang nggak bisa beli BBM, itu bukan urusan saya—sepanjang saya—, saya tidak mengatakan bahwa kesadaran konsumen di Indonesia itu tidak ada (tapi ada), dengan adanya surat-surat pembaca yang terus interaktif, tapi kesadaran itu adalah sesuatu kesadaran yang individual. Yang saya maksudkan ini adalah kesadaran yang naif, kalau itu persoalan saya, maka saya akan mempermasalahkannya, tapi kalau itu persoalan orang lain saya tidak mau peduli. Itu yang kemudian bagaimana membangun soal solidaritas yang memaksa, pemerintah mau kemudian membuka diri atau mau menyampaikan.

Saya kira itu sebagai pengalaman dari lembaga konsumen, mempelajari kebijakan negara bagaimana mengontrolnya, soalnya kalau nggak masuk di representasi sulit, karena begini contohnya, penentuan tarif angkutan di Jabotabek kemudian pemerintah menentukan 1500, nah ketika YLKI masuk pinjam cara menghitungnya seperti apa, dia-kan selalu berdasarkan production cost, saya bukan orang ekonomi tetapi menggunakan perasaan sebagai konsumen apa benar, karena kemudian satu kriteria itu sudah menyimpang, harga bis baru itu dihitung seharga 400 juta, memang besok saya bangun tidur itu semua Jakarta bisnya akan baru, mengapa kemudian dia meletakkan ini. Nah menggunakan data sekali lagi selalu menggunakan kartu trup, benar nggak anda sebagai ahli angkutan transportasi kalau anda menentukan untuk production cost, harga bis 400 juta memang besok pagi semua bis di Jakarta baru, mengapa anda menggunakan itu, maka dia sedikit merubah, perlunya bisa masuk sebetulnya untuk mengetahui bagaimana dia mengambil keputusan itu. Yang kedua ketika dia menghitung itukan hanya bis kosong 54 duduk karena ada yang berdiri dua kali, YLKI harus lebih pintar ikutin saja dari Blok M sampai kota, yang turun di Sudirman berapa orang catat—sekian orang—yang naik berapa, ikut—turun di HI berapa orang—catat terus ikut, berarti sebetulnya harus 300 kali, kalau dia bilang 54 ini saya kira 300 persennya, karena data yang saya kasihkan. Dengan data yang begitu murahan karena saya tidak punya, tidak bisa membayar ahli transportasi untuk mengatakan—itupun sudah membuat dia malu, saya nggak percaya—ini hitungan saya tanggal sekian, jam sibuk sekian, ini sekian begitu, lalu dengan tenang dia mulai merubah.

Nah itu sebetulnya yang dilakukan YLKI dengan cara-cara kampung, yang karena nggak punya keahlian tapi tekadnya bahwa ini harus dirubah karena nggak benar, dan memalukan, dia bilang untung temannya wartawan banyak—ini pak nggak benar—kemudian dia menggembor-gemborkan membuat malu, dan kemudian dia mengubah. Itu dalam skala kecil yang dilakukan lembaga konsumen karena nggak pakai strategi itu.

---

### **Taufiq/ Moderator**

Terimakasih, bapak-bapak ibu sekalian saya ingin mencoba mencari benang merah dari apa yang pertama oleh pak Daniel Dakhidae, ada beberapa hal kata kunci yang pak Daniel sampaikan tadi mengenai *civil society* di Indonesia, dan ajakan pak Daniel untuk mewaspadai apakah yang sekarang ini (pemerintah yang berkuasa sekarang), melakukan tindakan atau perilaku politik yang kurang lebih sama dengan rezim orde baru, pak Daniel pakai istilah yang relatif sangat *kuat* orde baru dia sebut sebagai *neo pasis state*, kemudian yang sekarang ini terjadi digerakan atau model proses politik di Indonesia pada masa reformasi, yang dilakukan oleh lembaga legislatif itu masih dalam kategori *aktifisme parlementarian*. Pak Daniel juga menyebutkan bagaimana kalau melakukan koleksi terhadap suatu proses, untuk kemudian bisa

menyusun landasan dasar baru yang bisa diterima oleh semua pihak, tapi mengingatkan kita pada konsep *coalition state* yang barangkali juga cukup riskan kalau kita pakai di Indonesia.

Dan dengan pak Mulya, ada kesamaan bahwa adanya ancaman terhadap civilities, dan hal ini barangkali penting untuk pengantar kita untuk membahas *civil society* dan kontrol terhadap kebijakan negara. Setidaknya kita ada baiknya juga membahas proses ditengahnya, yaitu pembentukan *good governance*, ini barangkali yang belum kita susun bersama, karena tadi teori disampaikan mengenai *civil society*, arah dari *civil society* untuk membentuk *good governance* ini juga belum kita temukan formulanya.

Ibu Sidney Jones, sudah banyak menceritakan berbagai pengalaman di banyak negara, seperti Filipina, Rusia dan Guatemala. Jadi kasus-kasus bagaimana satu gerakan dari masyarakat sipil dan tantangan-tantangan yang dihadapi disana. Di Filipina misalnya, contoh yang menarik adalah bagaimana kelompok yang menjatuhkan satu rezim, kemudian masuk kedalam satu pemerintahan dengan rencana untuk merubah dari dalam, tapi yang terjadi adalah praktek *cooptasi*. Tentu disini juga agak populer kasus tersebut di Indonesia, dan kita berupaya mencegah itu terjadi. Di Rusia, misalnya disebutkan ada beberapa hal yang menyangkut langkah-langkah yang harus dilakukan, bagaimana misalkan dari aspek expertise kemudian proses *civic education* dan kebebasan informasi, itu harus lebih ditegaskan. Di Guatemala, itu ada pesan disana bahwa suatu gerakan buruh itu jangan sampai justeru memberi counter produktif dengan tujuan-tujuan yang akan diperjuangkan.

Yang menyangkut Perpu mengenai terorisme, suatu pertanyaan mendasar yang sebenarnya yang harus kita carikan jawabannya, apakah benar-benar civil liberties di Indonesia itu terancam, karena beberapa negara lain yang dikutip oleh pak Mulya, misalkan di Australia, Denmark, India, Belarusia dan malah sekarang di Indonesia, menunjukkan bahwa kecenderungan perundang-undangan baru pasca tragedi 11 September di New York, dan 12 Oktober di Bali, itu cenderung mengorbankan banyak hal-hal dari kebebasan sipil.

Dan Ibu Indah, juga menyebutkan bagaimana pengalaman YLKI berdasarkan pengalaman pendahulu-pendahulunya membangun suatu model kerja, membangun strategi advokasi yang lebih baik kedepan. Setidak-tidaknya harapan untuk membangun jaringan dari 3 kelompok yang disebutkan *angry-women* atau *angry-man*, *keep-smiling*, dan *fress-charging* ini bisa secara sinergis membangun kekuatan masyarakat sipil. (*tentunya dari diskusi kita ini diharapkan pertama kali bisa kita lakukan tanya jawab mengenai hal-hal diatas*).

Terimakasih.

[www.fppm.org/Pojok/seminar\\_nasional2](http://www.fppm.org/Pojok/seminar_nasional2).

## **Kesadaran Konsumen Yogya Menuntut Hak Masih Rendah**

### **Yogya, Bernas**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY) yang juga staf YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) Yogyakarta, J Widijantoro SH, menilai kesadaran konsumen khususnya di Yogyakarta untuk memperkarakan pengusaha yang merugikannya ke pengadilan masih rendah. Bahkan, selain masih rendahnya kesadaran menuntut hak, di antara mereka banyak yang belum tahu akan hak-haknya.

Selain itu, masih banyak di antara mereka yang belum mengetahui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen YLKI sebagai mediasi untuk menyelesaikan kasus mereka. Tak sedikit pula konsumen yang enggan memerkarakan apa yang mereka alami sekalipun mereka dirugikan, dengan alasan butuh banyak waktu, tenaga juga biaya tak sedikit.

Widijantoro mengungkapkan hal itu kepada Bernas di sela-sela Diskusi Panel Telaah Terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen dari Perspektif Yuridis di ruang sidang FH UII Jalan Tamansiswa, Yogyakarta, Kamis (23/3).

"Banyak konsumen belum tahu harus pergi kemana untuk menceritakan kasusnya. Alamat YLKI saja masih banyak yang tidak tahu," ujarnya.

Terbukti, kata dosen fakultas hukum itu, YLKI selama ini belum pernah menemui konsumen yang memperkarakan ke pengadilan karena dirugikan pelaku usaha.

"Jika YLKI mengajukan alternatif untuk membawanya ke pengadilan, mereka langsung menolak. Akhirnya, YLKI berusaha merembugnya secara kekeluargaan," katanya.

### **Berbeda jauh**

Kondisi sikap konsumen ini sangat jauh berbeda dengan di negara maju seperti Amerika Serikat.

Menurut staf LKBH FH UII Ridwan Khairandy SH MH, budaya hukum AS telah membuat siapa pun yang dirugi- kan haknya secara otomatis mengadukannya ke pengadilan.

"Para konsumen di sana akan berkata talk to my lawyer (bicaralah dengan pengacara saya) jika ada pertanyaan atas kasusnya," kata Ridwan.

Enggannya para konsumen membawa kasusnya ke pengadilan, menurut Widijanto, karena selain membutuhkan biaya, juga waktu dan tenaga.

"Masak dirugikan Rp 300 saja misalnya, harus diusut ke pengadilan. Tentu mereka lebih baik tak melaku- kannya," ujarnya.

Padahal, tambahnya, jika sudah ada konsumen yang mengawali untuk melakukannya, untuk selanjutnya tentu akan terjadi perubahan.

Mengenai keengganan konsumen itu dicontohkan Ketua Bidang Pengaduan YLKI Yogyakarta Ny Mungisah Martopo SH dengan kasus perumahan Timoho Asri. Konsumen perumahan itu sebenarnya diimbau untuk memperkarakan ke pengadilan, tetapi para konsumen tidak mau dengan alasan butuh waktu, tenaga, dan biaya yang besar.

"Begitulah, banyak kasus yang tak teratasi terjadi di Yogya dan minta agar YLKI dapat menjembatani penyelesaian- an secara musyawarah," kata Ny Mungisah.

Adapun pengaduan konsumen di Yogyakarta ke YLKI Yogyakarta di Jalan Kaliurang Km 6,7 Gang Timor Timur bela- kangan ini telah terlihat variatif mulai dari persoalan makanan, minuman, asuransi, perumahan, hingga perbankan dan merek. (cr6) □ ="0">

**Kita sebagai konsumen selalu berada pada posisi yang lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu, tak ada salahnya kita lebih berhati-hati sebelum membeli atau menggunakan jasa untuk apapun yang kita butuhkan. Jangan terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Pelajari dulu pengalaman konsumen lain. Simak dan teliti sebelum Anda menjadi kecewa dan dirugikan. Semuanya kami kliping**